

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

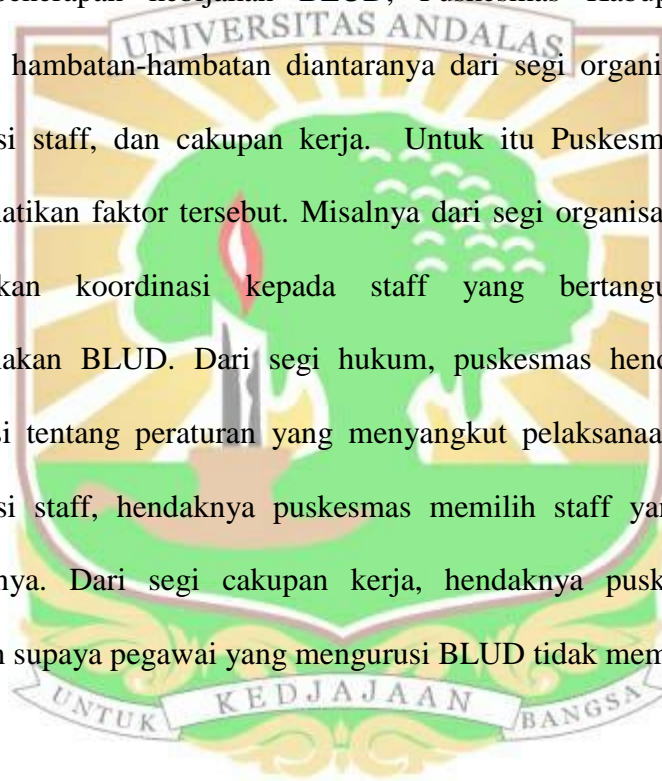
Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya serta hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas tergolong baik.
2. Dengan menggunakan model *Luder's* (1992) yang diaplikasi ke dalam model kontigensi akuntansi sektor publik maka terbentuk hipotesis kerja dan temuan dengan kontekstual variabel diantaranya:
  - a. Stimuli: Reformasi keuangan, Salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Pembaharuan atau reformasi di Puskesmas dengan mengubahnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dirasa pemerintah daerah sangat diperlukan agar UPTD Puskesmas agar dapat lebih otonom dan mandiri dalam pengelolaan keuangan.
  - b. Pengguna Informasi: Reformasi keuangan BLUD akan sangat dipengaruhi oleh perekrutan staff, pelatihan staff dan perubahan organisasi.
  - c. Hambatan Implementasi: Ada beberapa hal yang dipandang dapat menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas Kabupaten Tanah Datar diantaranya: organisasi, sistem hukum, kualifikasi staff, dan cakupan kerja.

## 5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini implikasi yang dapat diberikan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas Kabupaten Tanah Datar tergolong sudah baik, namun perlu dilakukan optimalisasi terutama dari segi pelaporan, karena masih ada yang belum sesuai dengan Kebijakan BLUD Dalam Permendagri 79 Tahun 2018.
2. Dalam penerapan kebijakan BLUD, Puskesmas Kabupaten Tanah Datar memiliki hambatan-hambatan diantaranya dari segi organisasi, sistem hukum, kualifikasi staff, dan cakupan kerja. Untuk itu Puskesmas hendaknya lebih memperhatikan faktor tersebut. Misalnya dari segi organisasi, Puskesmas dapat memberikan koordinasi kepada staff yang bertanggung jawab dalam melaksanakan BLUD. Dari segi hukum, puskesmas hendaknya memberikan sosialisasi tentang peraturan yang menyangkut pelaksanaan BLUD. Dari segi kualifikasi staff, hendaknya puskesmas memilih staff yang benar-benar ahli dibidangnya. Dari segi cakupan kerja, hendaknya puskesmas memberikan kebijakan supaya pegawai yang mengurus BLUD tidak memiliki kerja rangkap.



## 5.3 Saran

Saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terhadap penerapan BLUD dengan model kontigensi *Luder's* pada Puskesmas lainnya di Sumatera Barat.
2. Penelitian selanjutnya tidak terpaku pada faktor yang digunakan dalam penelitian ini dari segi organisasi, sistem hukum, kualifikasi staff, dan cakupan kerja tetapi menambahkan faktor lain seperti komitmen, perangkat pendukung, dan lain-lain.